

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini peranan komunikasi dan informatika dalam bentuk kehadiran TIK untuk mempermudah dan mempercepat arus komunikasi dan informasi. Melalui media digital/ internet dalam rangka peningkatan publik sudah menjadi keharusan setiap institusi/ instansi baik pemerintah/ swasta untuk sebesar-besarnya dapat diakses oleh masyarakat atau *stake holder*.

Pemanfaatan TIK untuk dijadikan media pencapaian tujuan organisasi telah dijadikan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dengan mengeluarkan berbagai peraturan baik dalam bentuk undang-undangan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika yang pada intinya mendorong institusi yang menangani komunikasi dan informatika untuk berkarya dengan tepat dan terarah untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat benar, agar “melek” TIK melalui program-program pemerintah yang pada akhirnya akan bermuaran kepada pencapaian misi kelima Provinsi Jawa Barat, yaitu meningkatkan pengelolaan data menuju data menuju satu data pembangunan untuk Jawa Barat.

Pemanfaatan dan pengembangan TIK di sektor pemerintah atau lebih dikenal dengan istilah *e-government* (e-gov) tersebut akan terus dilakukan setidaknya dalam jangka satu dua tahun kedepan konsep kebijakan Jabar Cyber Province akan terwujud.

Renja ini disusun dengan berpedoman pada Renstra Dinas Kominfo tahun 2013 – 2018, RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 juga memperhatikan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia serta Rensta Kabupaten dan Kota Se-Jawa Barat sehingga dapat mensinergikan pembangunan TIK di Jawa Barat dengan pembangunan TIK nasional maupun Kabupaten dan Kota di Jawa Barat.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17/per/M.Kominfo/03/2005 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
11. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *Electronic Government*;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat;
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat;
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Memberikan pedoman, landasan serta arah pembangunan di bidang penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2016.

b. Tujuan

- a) mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang komunikasi dan informatika.
- b) mewujudkan efektifitas kegiatan dalam penyelenggaraan pendayagunaan bidang komunikasi dan informatika.
- c) Optimalnya penggunaan alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan komunikasi dan informatika di Jawa Barat.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang:

Menjelaskan tentang Renja Dinas Kominfo, proses penyusunan Renja Dinas Kominfo, keterkaitan antara Renja Dinas Kominfo, dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Kominfo, dengan Renja Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Rencana Kerja Kabupaten/Kota juga tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum:

Memuat undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Kominfo serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Kominfo.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penulisan Renja Dinas Kominfo.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Kominfo serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMINFO TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kominfo Lalu dan capaian Renstra Dinas Kominfo

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RPKD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kominfo

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD DINAS KOMINFO TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kominfo Tahun Lalu dan capaian Renstra Dinas Kominfo

Penyajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kominfo tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Kominfo dijelaskan Pada tabel berikut ini

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kominfo dan
Pencapaian Rencana Dinas Kominfo s/d dengan tahun 2016
Provinsi Jawa Barat

Nama OPD : Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat

Lembar : 1 dari 5

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2013	Target dan realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun lalu (2014)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD tahun 2015)	Pikiran Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan		Catatan
									Target Renstra OPD tahun (2014)	Realisasi Renja OPD tahun (2014)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.25	01				Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika										
1.25	01		53		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi										
1.25	01	02	53	01	Kegiatan Layanan Pos Komersial	Persentase cakupan area infrastruktur pos dan telekomunikasi	100		70	70	100	70	70	70	
1.25	01	02	53	02	Kegiatan Komunikasi Bencana Alam	Persentase cakupan area infrastruktur pos dan telekomunikasi	100		70	70	100	70	70	70	
1.25	01	02	53	03	Kegiatan Standardisasi Pos dan Telekomunikasi	Persentase cakupan area infrastruktur pos dan telekomunikasi	100		70	70	100	70	70	70	
1.25	01	03	53	04	Kegiatan Saluran Serat Optik Bawah tanah Bersama (Ducting Bersama)	Persentase cakupan area infrastruktur pos dan telekomunikasi	100		70	70	100	70	70	70	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2013	Target dan realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun lalu (2014)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD tahun 2015)	Pikiran Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan		Catatan
									Target Renstra OPD tahun (2014)	Realisasi Renja OPD tahun (2014)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.25	01	03	53	05	Kegiatan Diseminasi Informasi Isu Strategis dan Aktual Melalui Lembaga Penyiaran dan Kemitraan Media	Jumlah penyebaran informasi melalui media elektronik dan non elektronik	46		40	40	100	45	45	97,83	
1.25	01	03	53	06	Kegiatan Sinergitas Komunikasi Pemerintahan		100		100	100	100	100	100	100	
1.25	01	03	53	07	Kegiatan Revitalisasi Lembaga Komunikasi dan Informasi Masyarakat	Jumlah penyebaran informasi melalui media elektronik dan non elektronik	46		40	40	100	45	45	97.83	
1.25	01	03	53	08	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	Persentase sengketa informasi yang diselesaikan	90		80	80	100	60	80	88.8	
1.25	01	04	53	09	Kegiatan Jabar Cyber Service (Layanan Publik Secara Online) pada Lembaga dan Fasilitas Publik	- Jumlah kegiatan dan komunitas untuk mendukung kontribusi masyarakat melek TIK terhadap pembangunan	26		6	6	100	11	11	42,31	
						- Jumlah penyebaran informasi melalui media elektronik dan non elektronik	6		-	-	-	6	6	100	
1.25	01	04	53	10	Kegiatan Standardisasi Telematika Pemerintah Provinsi Jawa barat	- Jumlah SDM yang memiliki kompetensi dan bersertifikat di Bidang TIK	60		40	40	100	43	43	71.6	
						- Jumlah kegiatan dan komunitas untuk mendukung kontribusi masyarakat melek TIK terhadap pembangunan	4		6	6	100	6	6	150	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2013	Target dan realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun lalu (2014)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD tahun 2015)	Pikiran Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan		Catatan
									Target Renstra OPD tahun (2014)	Realisasi Renja OPD tahun (2014)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.25	01	04	53	11	Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Paperles Office dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah penyebaran informasi melalui media elektronik dan non elektronik	49		39	39	100	43	43	87.76	
1.25	01	04	53	12	Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Koneksi Jaringan Komunikasi Digital Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Jumlah konektivitas digital	196		87	87	100	95	95	48.5	
1.25	01	05	53	13	Kegiatan Peningkatan Aplikasi Data Tak Terstruktur (ADT)		100		100	100	100	100	100	100	
1.25	01	05	53	14	Kegiatan Pengelolaan Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Jumlah penyebaran informasi melalui media elektronik dan non elektronik	1		1	1	100	1	1	100	
1.25	01	05	53	15	Kegiatan Peningkatan Implementasi Aplikasi Kompilasi Data TIK		100		100	100	100	100	100	100	
1.25	01	06	53	16	Kegiatan Mendayagunakan TIK Balai LPSE	Persentase pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik	90		50	100	200	65	100	105.2	
1.25	01	06	53	17	Kegiatan Meningkatkan Layanan Pengguna LPSE Provinsi Jawa Barat	Persentase pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik	90		50	100	200	65	100	105.2	
1.25	01	01	53	18	Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Komunikasi dan Informatika		100		100	100	100	100	100	100	
1.25	01	01	53	19	Kegiatan Pengelolaan Website		100		100	100	100	100	100	100	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2013	Target dan realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun lalu (2014)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD tahun 2015)	Pikiran Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan		Catatan
									Target Renstra OPD tahun (2014)	Realisasi Renja OPD tahun (2014)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					diskominfo.jabarprov.go.id										
1.25	38		59		Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya aparatur										
1.25	01	01	59	20	Kegiatan Meningkatkan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas Kominfo		100		100	100	100	100	100	100	
1.25	01	06	59	21	Kegiatan Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Balai LPSE		100		100	100	100	100	100	100	
1.25	01		60		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
1.25	01	01	60	22	Kegiatan Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran Dinas Kominfo		100		100	100	100	100	100	100	
1.25	01	06	60	23	Kegiatan Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran Balai LPSE		100		100	100	100	100	100	100	
1.25	01	03	60	24	Kegiatan Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat		100		100	100	100	100	100	100	
1.25	01		61		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
1.25	01	01	61	25	Kegiatan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Dinas Kominfo		100		100	100	100	100	100	100	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2013	Target dan realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun lalu (2014)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD tahun 2015)	Pikiran Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan		Catatan
									Target Renstra OPD tahun (2014)	Realisasi Renja OPD tahun (2014)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.25	01	06	61	26	Kegiatan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Balai LPSE		100		100	100	100	100	100	100	
1.25	01	06	61	27	Kegiatan Revitalisasi Balai LPSE Tahap IV		100		100	100	100	100	100	100	
1.25	01		62		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur										
1.25	01	01	62	28	Kegiatan Memelihara Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Kominfo		100		100	100	100	100	100	100	
1.25	01	06	62	29	Kegiatan Memelihara Sarana dan Prasarana Balai LPSE		100		100	100	100	100	100	100	
1.25	01		65		Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah										
1.25	01	01	65	30	Kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat		100		100	100	100	100	100	100	
1.25	01		66		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										
1.25	01	01	66	31	Kegiatan Aktivitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Kominfo		100		100	100	100	100	100	100	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Barat

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi dan berserifikat di Bidang TIK	-	-	40 orang	43 orang	50 orang	55 orang	40 orang	43 orang	50 orang	55 orang	
2.	Persentase cakupan area infrastruktur pos dan telekomunikasi	-	-	70%	70%	70%	80%	70%	70%	70%	80%	
3.	Persentase pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik	-	-	50%	65%	70%	80%	100%	100%	70%	80%	
4.	Jumlah kegiatan untuk mendukung kontribusi masyarakat melek TIK terhadap pembangunan	-	-	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	4 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	4 Kegiatan	
				6 Komunitas TIK	11 Komunitas TIK	16 Komunitas TIK	16 Komunitas TIK	6 Komunitas TIK	11 Komunitas TIK	16 Komunitas TIK	16 Komunitas TIK	
5.	Jumlah penyebaran informasi melalui media elektronik dan non elektronik	-	-	1 Keg. Web	1 Keg. Web	1 Keg. Web	1 Keg. Web	1 Keg. Web	1 Keg. Web	1 Keg. Web	1 Keg. Web	
				39 Kegiatan	43 Kegiatan	43 Kegiatan	46 Kegiatan	39 Kegiatan	43 Kegiatan	43 Kegiatan	46 Kegiatan	
				-	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	-	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				40 Kegiatan	45 Kegiatan	40 Kegiatan	46 Kegiatan	40 Kegiatan	45 Kegiatan	40 Kegiatan	46 Kegiatan	
6.	Persentase sengketa informasi yang terselesaikan	-	-	80%	60%	80%	85%	80%	80%	80%	85%	
7.	Jumlah konektivitas digital	-	-	87 Titik	95 Titik	176 Titik	186 Titik	87 Titik	95 Titik	176 Titik	186 Titik	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Aspek Kajian	Capaian /Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan Dinas Kominfo)	Eksternal (Diluar Kewenangan Dinas Kominfo)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	Paket lelang (konstruksi, Barang dan Jasa Lainnya) sudah mencapai 100% kecuali jasa konsultasi	1.UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2.UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3.Kepres No. 80/2003 berikut perubahannya dan terakhir dirubah oleh Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	Sosialisasi, Bimtek, penyediaan infrastruktur jaringan SPSE	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya komitmen pimpinan daerah kab/kota tentang pengadaan barang/jasa secara elektronik; - tidak adanya sanksi yang secara tegas mengharuskan pemanfaatan LPSE - Kebijakan Gubernur; komitmen OPD, Pengusaha dan LKPP 	Kekurangan sarana dan prasarana
	Lelang Jasa Konsultansi dilaksanakan tahun 2011		Sosialisasi, Bimtek, penyediaan infrastruktur jaringan SPSE		<ul style="list-style-type: none"> - Bimtek jasa konsultansi masih terbatas; - Aplikasi SPSE dari LKPP
	Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar di LPSE Provinsi Jawa Barat sudah mencapai 5.823 (tahun 2010)		Sosialisasi, Bimtek, dan Verifikasi	Pemerintah Kab/Kota dan Instansi Vertikal yang bergabung ke LPSE Jawa Barat	Kekurangan tenaga verifikator
infrastruktur e-government	Terselenggara-nya infrastruktur jaringan WAN berbasis <i>leased line</i> VPN IP ke seluruh OPD Pemprov Jabar (56 unit kerja)	1. UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. PP No 38/2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerinatah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;	Status keberadaan jaringan belum menggunakan mekanisme penganggaran secara <i>fixed cost</i>	<ul style="list-style-type: none"> -Besaran alokasi anggaran tidak pasti setiap tahunnya -Pemanfaatan jaringan oleh OPD, kab/kota dan kecamatan belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan tenaga teknis dari sisi jumlah dan kualifikasi - Tenaga operator di OPD, kab/kota dan kecamatan belum memenuhi standar kualifikasi kompetensi
	Terselenggara-nya infrastruktur jaringan WAN berbasis <i>leased line</i> VPN IP ke 14 kab/kota				
	Terselenggara-nya infrastruktur jaringan WAN kecamatan berbasis VPN <i>Instant</i> ke 156 kecamatan				

Aspek Kajian	Capaian /Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan Dinas Kominfo)	Eksternal (Diluar Kewenangan Dinas Kominfo)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Terbangun dan termanfaatkannya aplikasi dan konten secara <i>online</i> (SIPKD, LPSE, BPPT, paperless office)	4. Perda 29/2010 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.	Ketersediaan server untuk SIPKD memerlukan peningkatan kapasitas untuk pelayanan bagi seluruh OPD	Belum seluruh OPD memanfaatkan jaringan infrastruktur on line untuk SIPKD dan <i>paperless office</i>	Perlunya sosialisasi lebih mendalam dalam bentuk bimtek dan pendampingan bagi masing-masing OPD
	Terlaksananya edukasi literasi TIK bagi aparatur dan masyarakat melalui sarana dan prasarana TIK		<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan SDM operator dan instruktur bagi edukasi literasi TIK belum memenuhi standar minimal - Belum adanya SOP dan SPM bagi penyelenggaraan bimtek 	Beragamnya kualifikasi peserta bimtek dan edukasi literasi TIK aparatur dan masyarakat	Pemanfaatan hasil bimtek di OPD bagi aparatur dan sekolah bagi masyarakat belum dapat diukur secara terstandar
	Tersusunnya dan diterbitkannya regulasi berupa Perda Penyelenggaraan Kominfo;		Sosialisasi Perda kepada seluruh komponen masyarakat terutama pemangku kepentingan bidang kominfo belum didukung oleh juklak dan juknisnya	Penyebarluasan tentang keberadaan Perda melalui pelibatan seluruh pemangku kepentingan bidang kominfo	Penyebarluasan informasi tentang Perda No. 29 Tahun 2010 perlu melibatkan semua komponen pemangku kepentingan bidang kominfo secara terstruktur pada tingkat Provinsi dan kab/kota di seluruh Jabar
	pembinaan, monitoring dan evaluasi telematika belum optimal		Belum terkompilasinya data hasil pemetaan potensi bidang telematika di kab/kota	Koordinasi terkait bidang telematika di kab/kota terkendala karena struktur SOTK kab/kota yang berbeda-beda	Perlu secara berkala melakukan koordinasi dengan kab/kota khusus bidang kominfo
Pelayanan data dan informasi berbasis elektronik	Terbangunnya website interoperabilitas	Pergub No. 7/2009 Tentang Pendayagunaan <i>WebSite</i> di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.	Bimtek, sosialisasi	Kebijakan gubernur, respon OPD	Terbatasnya SDM tenaga teknis
	Penggunaan domain jabarprov.go.id tingkat provinsi telah mencapai 90%				
	Pelaksanaan layanan kumpulan data melalui pemanfaatan infrastruktur e-	Inpres No. 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan <i>e-Government</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah memiliki aplikasi terintegrasi bidang sosbudpol 	Belum optimalnya up dating data dari OPD bersangkutan	Mekanisme pengelolaan data yang belum terbentuk dalam suatu regulasi

Aspek Kajian	Capaian /Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan Dinas Kominfo)	Eksternal (Diluar Kewenangan Dinas Kominfo)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	government		dan perekonomian - Sudah memiliki aplikasi SMS gateway		
	Koordinasi interoperabilitas implementasi pengembangan e-government		Sudah memiliki aplikasi data tak terstruktur	Belum tersosialisasikan ya aplikasi pada OPD	Keterbatasan anggaran
	Fasilitasi <i>hosting website</i>	Pergub No. 7/2009 Tentang Pendayagunaan WebSite di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.	Memiliki kewenangan dalam pengaturan <i>hosting website</i>	Masih ada sebagian OD yang belum hosting ke website jabarprov.go.id	Pemahaman tupoksi Diskominfo yang belum diapresiasi secara penuh oleh OPD
Fasilitasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi	Penggelaran kabel di jalan provinsi dan lintas kab/kota	1. PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1. Permenkominfo No. 23/2009 Tentang Usaha Jasa Titipan 2. Perda 29/2010 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan informatika.	Belum adanya juklak/juknis untuk memproses legalitas penggelaran kabel	Tumpang tindihnya kewenangan dan Belum optimalnya koordinasi dengan kab/kota serta OPD tingkat Provinsi	Regulasi kurang mendukung.
	Data kantor cabang dan loket pelayanan operator		Belum adanya juklak/juknis untuk memproses legalitas kantor cabang loket pembayaran operator	Belum optimalnya koordinasi dengan kab/kota	Ada persinggungan perijinan dengan kab/kota (SITU), Regulasi kurang mendukung
	Identifikasi telsus tanpa menggunakan frekuensi		Belum adanya juklak/juknis untuk memproses legalitas	Tidak teridentifikasinya penyelenggara telsus tanpa frekuensi cakupan provinsi	Objek/rincian tidak ada
	Dokumen penyusunan prosedur, mekanisme pengukuran frekuensi		Belum adanya juklak/juknis untuk memproses legalitas	Regulasi dari pemerintah Pusat kurang mendukung	Belum tersedianya Dokumen penyusunan prosedur, mekanisme pengukuran frekuensi
	Belum adanya tupoksi pengelolaan pendapatan		Belum merupakan kewenangan dan tupoksi Dinas Kominfo	Kurang optimalnya koordinasi antar OPD Provinsi perihal pengelolaan keuangan	Menjadi temuan Inspektorat
Diseminasi Informasi	Termanfaatkan-nya Lembaga Penyiaran	1. UU No. 32/2002 tentang Penyiaran; 2. UU No. 14/2008	Bagian kewenangan Dinas Kominfo	LPP mempunyai segmentasi program tersendiri	Perlu adanya koordinasi dalam menyamakan

Aspek Kajian	Capaian /Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan Dinas Kominfo)	Eksternal (Diluar Kewenangan Dinas Kominfo)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Publik (RRI dan TVRI), Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Komunitas sebagai media diseminasi informasi	tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Perda No. 29/2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kominfo.	dalam mengkoordinasi kan dan memanfaatkan lembaga penyiaran		antara kewenangan Dinas Kominfo dengan segmentasi program Lembaga Penyiaran
	Termanfaatkan-nya media cetak sebagai media diseminasi informasi	1. UU No. 32/2002 tentang Penyiaran; 2. UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. UU No. 40/1999 Tentang Pers; 4. Perda No. 29/2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kominfo	Bagian kewenangan Dinas Kominfo dalam mengkoordinasi kan dan memanfaatkan media cetak		
	Termanfaatkan-nya media tradisional dan media luar ruang sebagai media diseminasi informasi	1. UU No. 32/2002 tentang Penyiaran; 2. UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. PP No. 61/2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008; 4. Perda No. 29/2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kominfo.	Bagian kewenangan Dinas Kominfo dalam mengkoordinasi kan dan memanfaatkan media tradisional dan media luar ruang		
	Termanfaatkan-nya sarana TIK melalui media <i>video conference</i>	1. UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Perda No. 29/2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kominfo.	Bagian kewenangan Dinas Kominfo dalam mengkoordinasi kan dan memanfaatkan media <i>video conference</i>		
Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Telah terbentuk PPID di lingkungan OPD Provinsi Jawa Barat	1. UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2. Kepgub No. 489/Kep-487-Diskominfo tentang Pembentukan PPID, 3. Peraturan Komisi			

Aspek Kajian	Capaian /Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan Dinas Kominfo)	Eksternal (Diluar Kewenangan Dinas Kominfo)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Informasi Publik			
Pembentukan Komisi Informasi Provinsi (KIP)	Telah terseleksi calon komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat	1. UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2. PP No. 61/2010 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Informasi Provinsi dan Kab/Kota			
Layanan Rekomendasi Kelengkapan Administrasi dan Teknis Penyiaran	Proposal permohonan ijin melalui Kementerian Kominfo dan KPID	Keputusan Menkominfo No. 18/2008 tentang Tata Cara Proses Perijinan Penyiaran di Daerah	Kurangnya Sosialisasi Kepmenkominfo No. 18 Tahun 2008	- Pemohon perijinan tidak banyak yang mengetahui bahwa proses perijinan untuk TV harus melalui Diskominfo ; - Forum rapat bersama (FRB) untuk menetapkan ijin revisi mengabaikan persyaratan adanya rekomendasi kelengkapan administrasi dan teknis dari Diskominfo	Tidak terkontrolnya kelayakan administrasi dan teknis
Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Hanya 7 kab/kota yang telah menyerahkan data KIM	Permodelan KIM Tahun 2008	Pembentukan KIM bukan merupakan kewenangan Dinas Kominfo Provinsi karena KIM tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat	Pembinaan KIM merupakan kewenangan dari kabupaten/kota	Belum termanfaatkannya KIM sebagai media penyampaian informasi
Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas)	Belum terbentuknya Bakohumas Jawa Barat		Pergub Bakohumas masih dalam proses penetapan	OPD Provinsi, kab/kota, BUMN, BUMD dan lembaga vertikal belum mengetahui mengenai pembentukan Bakohumas	Belum terkoordinasikan-nya informasi program-program pemerintah
Aplikasi Layanan Informasi Publik	Telah terbangun aplikasi layanan informasi publik				

Aspek Kajian	Capaian /Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan Dinas Kominfo)	Eksternal (Diluar Kewenangan Dinas Kominfo)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kapasitas Aparatur	Jumlah pegawai 99 orang dengan kompetensi Teknis yang terbatas	UU No. 8/1974 Tentang Pokok-Pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No.43/1999	Terbatasnya Kuantitas dan Kualitas Pegawai	Kebijakan Penempatan Pegawai	Masih kurangnya pegawai secara kualitas dan kuantitas
Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya ruang Server, Ruang Internet Publik/Media Center, Ruang Workshop, Ruang Kerja Pegawai,		Prioritas Penentuan Kegiatan	Kebijakan Penganggaran	Masih terbatasnya sarana dan prasarana

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan awal RKPD tahun 2016
Provinsi Jawa Barat

Nama OPD : Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat

Lembar 1 dari 5

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi					Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi					
1.	Kegiatan Layanan Pos Komersia	Provinsi Jawa Barat	Persentase cakupan area infrastruktur pos dan telekomunikasi	100%	296.000.000	Kegiatan Layanan Pos Komersia	Provinsi Jawa Barat	Persentase cakupan area infrastruktur pos dan telekomunikasi	100%	296.000.000	
2.	Kegiatan Komunikasi Bencana Alam	Provinsi Jawa Barat	Persentase cakupan area infrastruktur pos dan telekomunikasi	100%	331.000.000	Kegiatan Komunikasi Bencana Alam	Provinsi Jawa Barat	Persentase cakupan area infrastruktur pos dan telekomunikasi	100%	331.000.000	
3.	Kegiatan Standardisasi Pos dan Telekomunikasi	Provinsi Jawa Barat	Persentase cakupan area infrastruktur pos dan telekomunikasi	100%	550.600.000	Kegiatan Standardisasi Pos dan Telekomunikasi	Provinsi Jawa Barat	Persentase cakupan area infrastruktur pos dan telekomunikasi	100%	550.600.000	
4.	Kegiatan Saluran Serat Optik Bawah Tanah Bersama (Ducting Bersama)	Provinsi Jawa Barat	Persentase cakupan area infrastruktur pos dan telekomunikasi	100%	721.858.000	Kegiatan Saluran Serat Optik Bawah Tanah Bersama (Ducting Bersama)	Provinsi Jawa Barat	Persentase cakupan area infrastruktur pos dan telekomunikasi	100%	721.858.000	
5.	Kegiatan Diseminasi Informasi Isu Strategis dan Aktual Melalui Lembaga Penyiaran dan Kemitraan Media	Provinsi Jawa Barat	Jumlah penyebaran informasi melalui media elektronik dan non elektronik	100%	861.800.000	Kegiatan Diseminasi Informasi Isu Strategis dan Aktual Melalui Lembaga Penyiaran dan Kemitraan Media	Provinsi Jawa Barat	Jumlah penyebaran informasi melalui media elektronik dan non elektronik	100%	861.800.000	
6.	Kegiatan Sinergitas Komunikasi Pemerintahan	Provinsi Jawa Barat		100%	668.700.000	Kegiatan Sinergitas Komunikasi Pemerintahan	Provinsi Jawa Barat		100%	668.700.000	
7.	Kegiatan Revitalisasi Lembaga Komunikasi dan Informasi Masyarakat	Provinsi Jawa Barat	Jumlah penyebaran informasi melalui media elektronik dan non elektronik	100%	546.000.000	Kegiatan Revitalisasi Lembaga Komunikasi dan Informasi Masyarakat	Provinsi Jawa Barat	Jumlah penyebaran informasi melalui media elektronik dan non elektronik	100%	546.000.000	
8.	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	Provinsi Jawa Barat	Persentase sengketa informasi yang diselesaikan	100%	1.215.600.000	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	Provinsi Jawa Barat	Persentase sengketa informasi yang diselesaikan	100%	1.215.600.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9.	Kegiatan Jabar Cyber Service (Layanan Publik Secara Online) pada Lembaga dan Fasilitas Publik	Kab./Kota di Prov. Jabar	- Jumlah kegiatan untuk mendukung kontribusi masyarakat melek TIK terhadap pembangunan - Jumlah penyebaran informasi melalui media elektronik dan non elektronik	100%	354.000.000	Kegiatan Jabar Cyber Service (Layanan Publik Secara Online) pada Lembaga dan Fasilitas Publik	Kab./Kota di Prov. Jabar	- Jumlah kegiatan untuk mendukung kontribusi masyarakat melek TIK terhadap pembangunan - Jumlah penyebaran informasi melalui media elektronik dan non elektronik	100%	354.000.000	
10.	Kegiatan Standardisasi Telematika Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Kab./Kota di Prov. Jabar	- Jumlah SDM yang memiliki kompetensi dan bersertifikat di Bidang TIK - Jumlah kegiatan untuk mendukung kontribusi masyarakat melek TIK terhadap pembangunan	70%	1.609.900.000	Kegiatan Standardisasi Telematika Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Kab./Kota di Prov. Jabar	- Jumlah SDM yang memiliki kompetensi dan bersertifikat di Bidang TIK - Jumlah kegiatan untuk mendukung kontribusi masyarakat melek TIK terhadap pembangunan	70%	1.609.900.000	
11.	Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Paperless Office dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kab./Kota di Prov. Jabar	Jumlah penyebaran informasi melalui media elektronik dan non elektronik	100%	1.113.700.000	Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Paperless Office dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kab./Kota di Prov. Jabar	Jumlah penyebaran informasi melalui media elektronik dan non elektronik	100%	1.113.700.000	
12.	Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Koneksi Jaringan Komunikasi Digital Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Kab./Kota di Prov. Jabar	Jumlah konektivitas digital	100%	10.692.000.000	Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Koneksi Jaringan Komunikasi Digital Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Kab./Kota di Prov. Jabar	Jumlah konektivitas digital	100%	10.692.000.000	
13.	Kegiatan Peningkatan Aplikasi Data Tak Terstruktur (ADT)	Kota Bandung dan Kab./Kota di Prov. Jabar		100%	222.500.000	Kegiatan Peningkatan Aplikasi Data Tak Terstruktur (ADT)	Kota Bandung dan Kab./Kota di Prov. Jabar		100%	222.500.000	
14.	Kegiatan Pengelolaan Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Jumlah penyebaran informasi melalui media elektronik dan non elektronik	100%	1.013.928.000	Kegiatan Pengelolaan Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Jumlah penyebaran informasi melalui media elektronik dan non elektronik	100%	1.013.928.000	
15.	Kegiatan Peningkatan Implementasi Aplikasi Kompilasi Data TIK	Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota		100%	180.000.000	Kegiatan Peningkatan Implementasi Aplikasi Kompilasi Data TIK	Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota		100%	180.000.000	
16.	Kegiatan Mendayagunakan TIK Balai LPSE	Provinsi Jawa Barat	Persentase pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik	100%	367.494.000	Kegiatan Mendayagunakan TIK Balai LPSE	Provinsi Jawa Barat	Persentase pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik	100%	367.494.000	
17.	Kegiatan Meningkatkan Layanan Pengguna LPSE Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Persentase pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik	100%	517.972.000	Kegiatan Meningkatkan Layanan Pengguna LPSE Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Persentase pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik	100%	517.972.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
18.	Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Komunikasi dan Informatika	Provinsi Jawa Barat		100%	541.775.000	Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Komunikasi dan Informatika	Provinsi Jawa Barat		100%	541.775.000	
19.	Kegiatan Pengelolaan Website diskominfo.jabarprov.go.id	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat		100%	216.370.000	Kegiatan Pengelolaan Website diskominfo.jabarprov.go.id	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat		100%	216.370.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
20.	Kegiatan Meningkatkan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas Kominfo	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat		- 100% - 100%	730.000.000	Kegiatan Meningkatkan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas Kominfo	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat		- 100% - 100%	730.000.000	
21.	Kegiatan Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Balai LPSE	Kota Bandung		100%	128.250.000	Kegiatan Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Balai LPSE	Kota Bandung		100%	128.250.000	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
22.	Kegiatan Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran Dinas Kominfo	Bandung		- 100% - 100% -100%	3.362.200.000	Kegiatan Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran Dinas Kominfo	Bandung		- 100% - 100% -100%	3.362.200.000	
23.	Kegiatan Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran Balai LPSE	Bandung		100%	1.253.452.500	Kegiatan Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran Balai LPSE	Bandung		100%	1.253.452.500	
24.	Kegiatan Administrasi Perkantoran Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat	Bandung		100%	1.299.120.000	Kegiatan Administrasi Perkantoran Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat	Bandung		100%	1.299.120.000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
25.	Kegiatan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Dinas Kominfo	Kota Bandung		100%	3.627.273.000	Kegiatan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Dinas Kominfo	Kota Bandung		100%	3.627.273.000	
26.	Kegiatan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Balai LPSE	Prov.Jabar		100%	866.350.000	Kegiatan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Balai LPSE	Prov.Jabar		100%	866.350.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
27.	Kegiatan Revitalisasi Balai LPSE Tahap IV	Bandung		100%	855.000.000	Kegiatan Revitalisasi Balai LPSE Tahap IV	Bandung		100%	855.000.000	
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur					Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur					
28.	Kegiatan Memelihara Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Kominfo	Kota Bandung		- 100% - 100%	1.680.000.000	Kegiatan Memelihara Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Kominfo	Kota Bandung		- 100% - 100%	1.680.000.000	
29.	Kegiatan Memelihara Sarana dan Prasarana Balai LPSE	Bandung		100%	640.000.000	Kegiatan Memelihara Sarana dan Prasarana Balai LPSE	Bandung		100%	640.000.000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
30.	Kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung		100%	156.6000.000	Kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung		100%	156.6000.000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
31.	Kegiatan Aktivitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Kominfo	Kota Bandung		100%	130.515.000	Kegiatan Aktivitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Kominfo	Kota Bandung		100%	130.515.000	

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2016
Provinsi Jawa Barat

Nama OPD : Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi				
1.	Kegiatan Layanan Pos Komersia	Provinsi Jawa Barat	Persentase cakupan area infrastruktur pos dan telekomunikasi	100%	-
2.	Kegiatan Komunikasi Bencana Alam	Provinsi Jawa Barat	Persentase cakupan area infrastruktur pos dan telekomunikasi	100%	-
3.	Kegiatan Standardisasi Pos dan Telekomunikasi	Provinsi Jawa Barat	Persentase cakupan area infrastruktur pos dan telekomunikasi	100%	-
4.	Kegiatan Saluran Serat Optik Bawah Tanah Bersama (Ducting Bersama)	Provinsi Jawa Barat	Persentase cakupan area infrastruktur pos dan telekomunikasi	100%	-
5.	Kegiatan Diseminasi Informasi Isu Strategis dan Aktual Melalui Lembaga Penyiaran dan Kemitraan Media	Provinsi Jawa Barat	Jumlah penyebaran informasi melalui media elektronik dan non elektronik	100%	-
6.	Kegiatan Sinergitas Komunikasi Pemerintahan	Provinsi Jawa Barat		100%	-
7.	Kegiatan Revitalisasi Lembaga Komunikasi dan Informasi Masyarakat	Provinsi Jawa Barat	Jumlah penyebaran informasi melalui media elektronik dan non elektronik	100%	-
8.	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	Provinsi Jawa Barat	Persentase sengketa informasi yang diselesaikan	100%	-
9.	Kegiatan Jabar Cyber Service (Layanan Publik Secara Online) pada Lembaga dan Fasilitas Publik	Kab./Kota di Prov. Jabar	- Jumlah kegiatan untuk mendukung kontribusi masyarakat melekat TIK terhadap pembangunan - Jumlah penyebaran informasi melalui media elektronik dan non elektronik	100%	-
10.	Kegiatan Standardisasi Telematika Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Kab./Kota di Prov. Jabar	- Jumlah SDM yang memiliki kompetensi dan bersertifikat di Bidang TIK - Jumlah kegiatan untuk mendukung kontribusi masyarakat melekat TIK terhadap pembangunan	70%	-
11.	Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Paperless Office dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kab./Kota di Prov. Jabar	Jumlah penyebaran informasi melalui media elektronik dan non elektronik	100%	-
12.	Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Koneksi Jaringan Komunikasi Digital Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Kab./Kota di Prov. Jabar	Jumlah konektivitas digital	100%	-
13.	Kegiatan Peningkatan Aplikasi Data Tak Terstruktur (ADT)	Kota Bandung dan Kab./Kota di Prov. Jabar		100%	-
14.	Kegiatan Pengelolaan Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Jumlah penyebaran informasi melalui media elektronik dan non elektronik	100%	-
15.	Kegiatan Peningkatan Implementasi Aplikasi Kompilasi Data TIK	Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota		100%	-
16.	Kegiatan Mendayagunakan TIK Balai LPSE	Provinsi Jawa Barat	Persentase pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik	100%	-
17.	Kegiatan Meningkatkan Layanan Pengguna LPSE Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Persentase pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik	100%	-

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18.	Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Komunikasi dan Informatika	Provinsi Jawa Barat		100%	-
19.	Kegiatan Pengelolaan Website diskominfo.jabarprov.go.id	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat		100%	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
20.	Kegiatan Meningkatkan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas Kominfo	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat		- 100% - 100%	-
21.	Kegiatan Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Balai LPSE	Kota Bandung		100%	-
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
22.	Kegiatan Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran Dinas Kominfo	Bandung		- 100% - 100% -100%	-
23.	Kegiatan Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran Balai LPSE	Bandung		100%	-
24.	Kegiatan Administrasi Perkantoran Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat	Bandung		100%	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
25.	Kegiatan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Dinas Kominfo	Kota Bandung		100%	-
26.	Kegiatan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Balai LPSE	Prov.Jabar		100%	-
27.	Kegiatan Revitalisasi Balai LPSE Tahap IV	Bandung		100%	-
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur				
28.	Kegiatan Memelihara Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Kominfo	Kota Bandung		- 100% - 100%	-
29.	Kegiatan Memelihara Sarana dan Prasarana Balai LPSE	Bandung		100%	-
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
30.	Kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung		100%	-
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
31.	Kegiatan Aktivitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Kominfo	Kota Bandung		100%	-

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rumusan arah kebijakan dalam Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

- a. Program Kominfo yang mendukung fokus pembangunan pemerintah Indonesia;
- b. Program kerja kementerian komunikasi dan informatika sebagai leading sektor;
- c. Program legislasi nasional.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2016, Dinas Kominfo menjadikan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2016, tersebut sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan komunikasi dan informatika di Jawa Barat yang kesemuanya itu bermuara pada upaya pencapaian visi dan misi pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang berada di bawah dan bertanggungjawab pada Kepala Daerah (Gubernur) melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi, dekosentrasi dan tugas pembantuan;
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaran perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi serta pelaksanaan kebijakan teknis pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik;
 - b. Penyelenggaraan fasilitas dan pengendalian komunikasi dan informatika meliputi pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik;
 - c. Penyelenggaran kordinasi dan pembinaan UPTD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas komunikasi dan Informatika

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dibidang komunikasi dan informatika, terdapat beberapa Isu-isu strategis yang akan dihadapi dan perlu mendapatkan perhatian pada rentang waktu 2013-2018 antara lain :

1. Inisiatif Jabar *Cyber Province*

Implementasi *Jabar Cyber Province* (JCP) ini dimaksudkan untuk memberikan kemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Jawa Barat dalam bentuk peningkatan pelayanan publik berbasis *Cyber* (*Jabar Cyber Services*).

2. Proses Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

Demi capainya proses pengadaan barang/jasa yang lebih transparan dan dapat diikuti dengan jumlah peserta yang cukup luas dengan mengedepankan proses persaingan yang sehat, didoronglah implementasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

3. Satu Data Pembangunan Jawa Barat

Untuk mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya, maka penentuan arah dan sasaran pembangunan daerah harus dilandasi oleh data dan informasi yang akurat. Untuk itu pengelolaan data dan informasi daerah harus difasilitasi secara terpadu dan terintegrasi dengan berbasiskan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

4. Layanan pemerintah berbasis Teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) atau layanan Online

Layanan masyarakat yang termasuk urusan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan dilayani berbasis TIK. Layanan masyarakat yang semula secara manual (misalnya: perijinan, pendapatan daerah, pengadaan barang/jasa dll) secara bertahap akan dilayani berbasis TIK.

5. Tuntutan Publik akan Keterbukaan Informasi dan Transparansi

Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya.

6. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), khususnya teknologi informasi yang pesat perlu direspon dan diantisipasi dengan berbagai program dan kegiatan yang bisa dimanfaatkan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat melanda berbagai wilayah dan komunitas masyarakat, termasuk juga kebutuhan

masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Bila tidak diantisipasi secara tepat tentu akan membawa eksese yang kurang baik bagi masyarakat.

7. Terbatasnya sarana dan prasarana pos dan telematika

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat telah mengantisipasinya dengan menetapkan visi “**Terwujudnya Masyarakat Informasi Jawa Barat melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien**”. Visi tersebut dijabarkan dalam 6 (enam) misi Dinas Kominfo, yaitu:

1. Meningkatkan SDM aparatur bidang teknologi informasi dan komunikasi;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana bidang informasi dan komunikasi;
3. Mengoptimalkan penggunaan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik;
4. Meningkatkan kerjasama masyarakat pemerintah dan swasta dalam pembangunan teknologi informasi dan komunikasi;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi kepada masyarakat melalui berbagai media;
6. Mengoptimalkan penerapan e-government di provinsi Jawa Barat.

Visi dan Misi Dinas Kominfo, dalam capaiannya merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dimana **arah kebijakan umum pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) difokuskan untuk mewujudkan *Jabar cyber province* pada tahun 2016**, yang didukung oleh layanan *online*, termasuk dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik, dan masyarakat berbudaya informasi serta penyelenggaraan pos dan telekomunikasi. Hal tersebut sebagai suatu upaya dalam bentuk aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik dengan berbasiskan kepada Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Jawa Barat.

Dengan terwujudnya *Jabar Cyber Province* diharapkan diperoleh manfaat antara lain:

Bagi Pemerintah Daerah:

- Memudahkan komunikasi antar unit kerja;
- Memudahkan pengiriman dan pengelolaan data;
- Mewujudkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah.

Bagi Masyarakat:

- Kemudahan akses internet untuk berbagai aktivitas;
- Mendapatkan layanan yang lebih mudah;
- Meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Hal ini sejalan dengan:

- Perubahan besar (transformasi) dalam kehidupan masyarakat terjadi sebagai pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- Percepatan proses modernisasi menuju terwujudnya masyarakat informasi (*Information Society*) dengan merubah diri secara gradual *resource based society* menjadi *Knowledge based society*.

Masyarakat informasi ditandai dengan:

- a. Karya-karya bidang informasi;
- b. Volume arus informasi yang sangat besar ;
- c. Interaktivitas relasi-relasi ;
- d. Integrasi dan konvergensi aktivitas-aktivitas;
- e. Pertumbuhan dan interkoneksi jaringan-jaringan;
- f. Kecenderungan mengglobal;
- g. Budaya post modern;
- h. Dan perubahan lainnya.

Serta berlandaskan pada agenda Dunia Dalam World Summit On Information Society (WSIS), Geneve, Dec 2003:

- Kesempatan untuk mewujudkan masyarakat informasi di setiap negara;
- Mengupayakan agar seluruh pedesaan, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan dan lembaga Pemerintahan terhubung dalam suatu jaringan;
- Interaksi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan diseluruh dunia secara mudah dan cepat dengan perantaraan teknologi dan komunikasi.

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan dan sasaran Renja Dinas Kominfo adalah sebagai berikut:

a. Maksud

Memberikan pedoman, landasan serta arah pembangunan di bidang penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2016.

b. Tujuan

- a) mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang komunikasi dan informatika
- b) mewujudkan efektifitas kegiatan dalam penyelenggaraan pendayagunaan bidang komunikasi dan informatika.
- c) Optimalnya penggunaan alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan komunikasi dan informatika di Jawa Barat.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kominfo pada Tahun 2016 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kominfo Tahun 2013-2018 yang direncanakan dengan mempertimbangkan berbagai faktor diantaranya adalah guna mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Jawa Barat, pencapaian MDGs serta berbagai faktor lainnya.

Adapun program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan Dinas Kominfo pada tahun 2016 terdiri dari 7 Program dan 31 Kegiatan dengan lokasi kegiatan tersebar di kabupaten/kota se-Jawa Barat. Total anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan ini sebesar Rp 36.749.227.700,00,- (Terbilang Tiga Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kominfo Tahun 2016
Dan Prakiraaan Maju Tahun 2017
Provinsi Jawa Barat

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp.)
1.25		38			Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika								
1.25		38	53		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi								
1.25	01	02	53	01	Kegiatan Layanan Pos Komersial	Persentase cakupan area infrastruktur pos dan telekomunikasi	Provinsi Jawa Barat	100%	296.000.000	APBD Provinsi Jawa Barat		100%	355.200.000
1.25	01	02	53	02	Kegiatan Komunikasi Bencana Alam	Persentase cakupan area infrastruktur pos dan telekomunikasi	Provinsi Jawa Barat	100%	331.000.000	APBD Provinsi Jawa Barat		100%	397.200.000
1.25	01	02	53	03	Kegiatan Standardisasi Pos dan Telekomunikasi	Persentase cakupan area infrastruktur pos dan telekomunikasi	Provinsi Jawa Barat	100%	550.600.000	APBD Provinsi Jawa Barat		100%	660.720.000
1.25	01	03	53	04	Kegiatan Saluran Serat Optik Bawah tanah Bersama (Ducting Bersama)	Persentase cakupan area infrastruktur pos dan telekomunikasi	Provinsi Jawa Barat	100%	721.858.000	APBD Provinsi Jawa Barat		100%	866.229.600
1.25	01	03	53	05	Kegiatan Diseminasi Informasi Isu Strategis dan Aktual Melalui Lembaga Penyiaran dan Kemitraan Media	Jumlah penyebaran informasi melalui media elektronik dan non elektronik	Provinsi Jawa Barat	100%	861.800.000	APBD Provinsi Jawa Barat		100%	1.034.160.000
1.25	01	03	53	06	Kegiatan Sinergitas Komunikasi Pemerintahan		Provinsi Jawa Barat	100%	668.700.000	APBD Provinsi Jawa Barat		100%	802.440.000
1.25	01	03	53	07	Kegiatan Revitalisasi Lembaga Komunikasi dan Informasi Masyarakat	Jumlah penyebaran informasi melalui media elektronik dan non elektronik	Provinsi Jawa Barat	100%	546.000.000	APBD Provinsi Jawa Barat		100%	655.200.000
1.25	01	03	53	08	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	Persentase sengketa informasi yang diselesaikan	Provinsi Jawa Barat	100%	1.215.600.000	APBD Provinsi Jawa Barat		100%	1.458.720.000
1.25	01	04	53	09	Kegiatan Jabar Cyber Service (Layanan Publik Secara Online) pada Lembaga dan Fasilitas Publik	- Jumlah kegiatan dan komunitas untuk mendukung kontribusi masyarakat melek TIK terhadap pembangunan - Jumlah penyebaran informasi melalui media elektronik dan non elektronik	Kab./Kota di Prov. Jabar	100%	354.000.000	APBD Provinsi Jawa Barat		100%	424.800.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp.)
1.25	01	04	53	10	Kegiatan Standardisasi Telematika Pemerintah Provinsi Jawa barat	- Jumlah SDM yang memiliki kompetensi dan bersertifikat di Bidang TIK - Jumlah kegiatan dan komunitas untuk mendukung kontribusi masyarakat melek TIK terhadap pembangunan	Kab./Kota di Prov. Jabar	70%	1.609.900.000	APBD Provinsi Jawa Barat		70%	1.931.880.000
1.25	01	04	53	11	Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Paperles Office dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah penyebaran informasi melalui media elektronik dan non elektronik	Kab./Kota di Prov. Jabar	100%	1.113.700.000	APBD Provinsi Jawa Barat		100%	1.336.440.000
1.25	01	04	53	12	Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Koneksi Jaringan Komunikasi Digital Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Jumlah konektivitas digital	Kab./Kota di Prov. Jabar	100%	10.692.000.000	APBD Provinsi Jawa Barat		100%	12.830.400.000
1.25	01	05	53	13	Kegiatan Peningkatan Aplikasi Data Tak Terstruktur (ADT)		Kota Bandung dan Kab./Kota di Prov. Jabar	100%	222.500.000	APBD Provinsi Jawa Barat		100%	267.000.000
1.25	01	05	53	14	Kegiatan Pengelolaan Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Jumlah penyebaran informasi melalui media elektronik dan non elektronik	Provinsi Jawa Barat	100%	1.013.928.000	APBD Provinsi Jawa Barat		100%	1.215.837.840
1.25	01	05	53	15	Kegiatan Peningkatan Implementasi Aplikasi Kompilasi Data TIK		Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/ Kota	100%	180.000.000	APBD Provinsi Jawa Barat		100%	216.000.000
1.25	01	06	53	16	Kegiatan Mendayagunakan TIK Balai LPSE	Persentase pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik	Provinsi Jawa Barat	100%	367.494.000	APBD Provinsi Jawa Barat		100%	440.992.800
1.25	01	06	53	17	Kegiatan Meningkatkan Layanan Pengguna LPSE Provinsi Jawa Barat	Persentase pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik	Provinsi Jawa Barat	100%	517.972.000	APBD Provinsi Jawa Barat		100%	621.566.400
1.25	01	01	53	18	Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Komunikasi dan Informatika		Provinsi Jawa Barat	100%	541.775.000	APBD Provinsi Jawa Barat		100%	650.130.000
1.25	01	01	53	19	Kegiatan Pengelolaan Website diskominfo.jabarprov.go.id		Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	100%	216.370.000	APBD Provinsi Jawa Barat		100%	259.664.000
1.25	38		59		Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya aparatur								
1.25	01	01	59	20	Kegiatan Meningkatkan Kesejahteraan dan Kemampuan		Kab./Kota Seluruh	- 100%	730.000.000	APBD Provinsi		- 100%	876.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp.)
					Aparatur Dinas Kominfo		Jawa Barat	- 100%		Jawa Barat		- 100%	
1.25	01	06	59	21	Kegiatan Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Balai LPSE		Kota Bandung	100%	128.250.000	APBD Provinsi Jawa Barat		100%	153.900.000
1.25	01		60		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1.25	01	01	60	22	Kegiatan Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran Dinas Kominfo		Bandung	- 100%	3.362.200.000	APBD Provinsi Jawa Barat		- 100%	4.034.640.000
								- 100%				- 100%	
								-100%				-100%	
1.25	01	06	60	23	Kegiatan Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran Balai LPSE		Bandung	100%	1.253.452.500	APBD Provinsi Jawa Barat		100%	1.504.143.000
1.25	01	03	60	24	Kegiatan Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat		Bandung	100%	1.299.120.000	APBD Provinsi Jawa Barat		100%	1.558.944.000
1.25	01		61		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
1.25	01	01	61	25	Kegiatan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Dinas Kominfo		Kota Bandung	100%	3.627.273.000	APBD Provinsi Jawa Barat		100%	4.352.727.600
1.25	01	06	61	26	Kegiatan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Balai LPSE		Prov.Jabar	100%	866.350.000	APBD Provinsi Jawa Barat		100%	1.039.620.000
1.25	01	06	61	27	Kegiatan Revitalisasi Balai LPSE Tahap IV		Bandung	100%	855.000.000	APBD Provinsi Jawa Barat		100%	1.026.000.000
1.25	01		62		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur								
1.25	01	01	62	28	Kegiatan Memelihara Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Kominfo		Kota Bandung	- 100%	1.680.000.000	APBD Provinsi Jawa Barat		- 100%	2.016.000.000
								- 100%				- 100%	
1.25	01	06	62	29	Kegiatan Memelihara Sarana dan Prasarana Balai LPSE		Bandung	100%	640.000.000	APBD Provinsi Jawa Barat		100%	768.000.000
1.25	01		65		Program Pengelolaan Keuangan								

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp.)
					dan Kekayaan Daerah								
1.25	01	01	65	30	Kegiatan Pengelolaan Keuangan dan aset Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat		Kota Bandung	100%	156.6000.000	APBD Provinsi Jawa Barat		100%	187.920.000
1.25	01		66		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
1.25	01	01	66	31	Kegiatan Aktivitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Kominfo		Kota Bandung	100%	130.515.000	APBD Provinsi Jawa Barat		100%	156.618.000

BAB IV

PENUTUP

Renja Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat tahun 2016 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo guna mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang komunikasi dan informatika serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan komunikasi dan informatika di Jawa Barat.

Renja yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan dengan harapan Renja ini dapat dijadikan acuan pelaksanaan tugas Dinas Kominfo tahun 2016. Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan pegawai Dinas Kominfo harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*).